
STRATEGI PERTAHANAN TIONGKOK DALAM MENGOPTIMALKAN POSTUR PERTAHANAN NEGARA

Fardhal Virgiawan Ramadhan

Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Jawa Barat, Indonesia

Email: officialafdhal@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima 05 Januari 2021

Diterima dalam bentuk revisi
10 Januari 2021

Diterima dalam bentuk revisi
15 Januari 2021

Keywords:

defense strategy; national security; threat; east asia stability

ABSTRACT

China is increasing its defense capabilities based on China's National Defense in The New Era in 2019. China's increased defense capabilities are not solely to optimize the country's defense posture for its national security. But as one of the measures to maintain regional stability in East Asia. According to China's National Defense, there are threats in the East Asia region that could lead to the stability of surrounding countries such as the development of South Korea's THAAD defense capabilities, changes in Japan's defense policy, North Korea's ballistic missile capabilities and external involvement in the East Asia Region, namely the United States. The purpose of this study is to explain and analyze defense strategies carried out by China based on problems that occurred in China's National Defense in The New Era 2019. This study uses realism, security dilemma, national security, and defense strategy. The results in this study showed that changes and improvements in the country's defense capabilities in the East Asia region caused instability in the Region. This makes countries in the East Asia region distrust each other. For the distrust that occurred it is very important for China to increase its defense capabilities to optimize its country's defense posture to be stronger and modern.

ABSTRAK

Tiongkok meningkatkan kemampuan pertahanannya berdasarkan China's National Defense in The New Era in 2019. Tiongkok melakukan peningkatan kemampuan pertahanannya tidak semata-mata untuk mengoptimalkan postur pertahanan negara untuk keamanan nasionalnya. Tetapi sebagai salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas kawasan di Asia Timur. Berdasarkan China's National Defense bahwa terdapat ancaman di kawasan Asia Timur yang dapat menimbulkan stabilitas negara di sekitarnya seperti perkembangan kemampuan pertahanan THAAD Korea Selatan, perubahan kebijakan pertahanan Jepang, kemampuan rudal balistik Korea Utara dan keterlibatan aktor eksternal di Kawasan Asia Timur yakni Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis strategi pertahanan yang dilakukan oleh Tiongkok berdasarkan

Kata kunci:

strategi pertahanan; keamanan nasional; ancaman; stabilitas asia timur

permasalahan yang terjadi dalam China's National Defense in The New Era 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan realisme, security dilemma, keamanan nasional, dan strategi pertahanan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dengan adanya perubahan dan peningkatan kemampuan pertahanan negara di kawasan Asia Timur menimbulkan instabilitas di Kawasan. Hal ini menjadikan negara di kawasan Asia Timur menjadi distrust antara satu dengan yang lainnya. Atas distrust yang terjadi sangat penting bagi Tiongkok melakukan peningkatan kemampuan pertahanannya untuk mengoptimalkan postur pertahanan negaranya menjadi lebih kuat dan modern.

Pendahuluan

Postur pertahanan negara menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional. Keamanan nasional dapat diterminologikan sebagai kepentingan nasional negara dalam menghadapi segala ancaman sehingga keamanan nasional menjadi nilai penting bagi setiap negara. Keamanan dapat diartikan sebagai salah satu kemampuan suatu negara dalam melindungi nilai-nilai yang bersifat internal dari ancaman luar yang dapat mengganggu nilai tersebut (Anggoro, 2003). Tiongkok meningkatkan keamanan nasional negaranya untuk dapat melindungi nilai-nilai internal negaranya atas gangguan dan ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini dapat dilihat dari kapasitas dan kapabilitas militer yang memadai di kawasan tersebut sehingga menyebabkan ketidakstabilan di kawasan tersebut.

Kawasan Asia Timur salah satu kawasan yang terletak di bagian Timur Asia. Negara di kawasan Asia Timur terdiri atas Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara (Teuku May Rudi, 1997). Negara tersebut memiliki hubungan yang tidak stabil terutama dalam pertahanan. Kemampuan pertahanan negara di kawasan tersebut menyebabkan ketidakstabilan hubungan diantara negara di kawasan tersebut. Kemampuan pertahanan ini dapat menyebabkan *security dilemma* bagi negara disekitarnya atas respon kemampuan militer yang dikembangkan oleh negara sekitarnya. Ketidakstabilan ini sangat berkaitan dengan sejarah masa lalu yang kelam negara di kawasan ini dalam hubungan internasional.

Berdasarkan *China's National Defense in The New Era* Tahun 2019. Tiongkok menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Timur yang dapat menyebabkan stabilitas dan perdamaian di kawasan terganggu. Diantaranya pada tahun 2015, dalam *National Defense Program Guidelines* Jepang melakukan perubahan kebijakan pertahanannya dari *basic defense force* menjadi *dynamic defense force*, yang berarti pertahanan Jepang semakin aktif dalam melakukan kegiatan seperti operasi dan patroli militer bersama meskipun dalam kondisi stabil (The People's Republic of China, 2010). Perubahan kebijakan pertahanan Jepang yang secara tiba-tiba menjadikan keamanan di kawasan Asia Timur semakin rentan akan dilema sehingga setiap negara meningkatkan kemampuan pertahanannya untuk mencapai keamanan nasionalnya. Hal ini diperkuat bahwa setelah perubahan kebijakan pertahanan tersebut Jepang semakin aktif dalam meningkatkan pertahanan negaranya. Kemudian, tahun 2018 Jepang diketahui membeli alutsista buatan Amerika Serikat sebanyak 45 jet jenis F-35 (CNN Indonesia, 2018). Pembelian jet tersebut untuk mempertegas kemitraan dengan Amerika Serikat dan untuk membangun dan memperkuat sistem pertahanan negaranya termasuk pengembangan pertahanan berbasis misil balistik. Hal ini sesuai dengan perubahan kebijakan Jepang dari *self defense* menjadi *collective self defense*.

Pada tahun 2016, kawasan Asia Timur dikejutkan dengan sistem pertahanan berbasis misil balistik THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) yang dikembangkan

oleh Korea Selatan yang bertujuan untuk mempertahankan keamanan negaranya dari serangan senjata nuklir Korea Utara (Sebastien Roblin, 2019). Akan tetapi, jangkauan radar THAAD ini ternyata dapat mendeteksi pertahanan militer Tiongkok di wilayah utara dan timur yang merupakan bagian dari penempatan peralatan militer Tiongkok (Sankaran, n.d.) sehingga hal ini memperparah hubungan kedua negara dan membuat *security dilemma* terjadi di kawasan meningkat. Tiongkok menjelaskan permasalahan penempatan ini menjadi salah satu hal yang dapat memperparah *distrust* antarnegara di kawasan Asia Timur. Penempatan THAAD ini selain dapat menjangkau wilayah pertahanan Tiongkok. Penempatan dan pengalokasian tersebut merupakan atas bantuan militer dengan negara aliansinya yaitu Amerika Serikat.

Salah satu ancaman terbesar yang dirasakan oleh negara di kawasan Asia Timur yakni dengan pengembangan dan uji coba senjata nuklir yang dilakukan berulang kali oleh Korea Utara. Hal ini tentu menyebabkan instabilitas dan keamanan nasional di kawasan Asia Timur. Diketahui pada tahun 2016, Korea Utara telah melakukan uji coba senjata nuklir sebanyak lima kali yang dilakukan secara berturut-turut setiap bulannya (Ericssen, 2017). Kemudian, dilanjutkan pada tahun 2017, Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir yang tidak kalah fantastis yakni dengan melakukan uji coba rudal balistik antar benua yang radar nuklir tersebut dapat mencapai Hawaii (Pascal, 2017). Uji coba dan peluncuran rudal balistik tersebut merupakan salah satu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Tentu dengan dilakukannya uji coba senjata nuklir tersebut akan menimbulkan ancaman baik secara militer dan non militer, terutama bagi negara di kawasan Asia Timur itu sendiri.

Dilema keamanan di kawasan Asia Timur diperkuat ketika Jepang dan Korea Selatan melakukan operasi militer bersama dengan Amerika Serikat yang secara khusus ditujukan untuk pertahanan angkatan laut ketiga negara di kawasan Asia Timur yang berarti bahwa Amerika Serikat melakukan penguatan pertahanan militernya di kawasan dengan negara aliansinya. Ketiga negara

tersebut melakukan latihan menembak, operasi pencegahan serangan udara, perang anti-kapal selam, dan pengisian ulang bahan bakar di laut (CNN Indonesia, 2019). Dengan demikian, ancaman yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh ancaman yang disebabkan antarnegara di kawasan Asia Timur, tetapi terdapat aktor eksternal yang berperan sehingga turut memperparah *security dilemma* yang terjadi. Kegiatan berupa latihan, operasi, dan patroli militer yang memiliki tujuan untuk memperkuat pertahanan negara akan menimbulkan kekhawatiran bagi negara lain sehingga timbul sikap *misperception* antarnegara disekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan *security dilemma* dan memperparah sikap tidak saling percaya diantara negara muncul.

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh (Wu, 2019), *balancing* yang dilakukan oleh suatu negara dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi negara dalam melakukan hubungannya. Jepang dan Korea Selatan melakukan *balancing* dengan Amerika Serikat sebagai negara aliansi yang dianggap mampu untuk mengimbangi Tiongkok di kawasan Asia Timur. Jepang dan Korea Selatan menjamin keamanannya kepada Amerika Serikat. Akan tetapi, hal ini dapat mempengaruhi hubungan dan pola interaksi negara di kawasan tersebut. Hal ini memperparah hubungan dan interaksi yang terjadi di kawasan sehingga *security dilemma* di kawasan Asia Timur kembali diperparah. Amerika Serikat melakukan upaya berupa *soft balancing/ indirect balancing* melalui negara aliansinya yaitu Jepang dan Korea Selatan. Masalah ini muncul sebagai salah satu akibat dari pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dengan kebijakan '*Pivot to Asia*' yang dicanangkan sehingga memiliki keterikatan dengan negara aliansinya dalam memperkuat pertahanan yang terjalin dengan membantu berupa bantuan militer, penempatan pasukan militer dengan didukung kapasitas dan kapabilitas militer.

Berdasarkan fenomena tersebut, Tiongkok memperkuat postur pertahanan negaranya atas permasalahan yang mengganggu stabilitas dan perdamaian di kawasan. Tiongkok melakukan strategi pertahanan untuk dapat mengoptimalkan postur pertahanan negaranya melalui *China's*

National Defense in The New Era. Fenomena ini menjadikan pentingnya pengoptimalan postur pertahanan negara didalam kondisi yang anarki. Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi pertahanan Tiongkok dalam mengoptimalkan postur pertahanan negaranya berdasarkan *China's National Defense in The New Era*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan luaran penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang dikelola dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa (buku, jurnal, portal berita dan sumber pustaka lainnya) untuk dapat mendukung penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti tidak hanya menyederhanakan keseluruhan data tetapi akan menarik inti dari pernyataan dalam penjelasan yang akan dilakukan terkait dengan strategi pertahanan Tiongkok dalam mengoptimalkan postur pertahanan negaranya.

Hasil dan Pembahasan

A. Realisme: Sebagai Upaya dalam Mencapai Keamanan Nasional

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu **Realisme**. Realisme memandang bahwa permasalahan utama dalam hubungan internasional yaitu kondisi anarki dan tidak adanya otoritas yang mengatur dalam hubungan antarnegara sehingga negara berhak memutuskan setiap keputusannya (Jill Steans and Lloyd Pettiford, 2009). Pemikiran realisme dapat dilihat di kawasan Asia Timur bahwa kondisi anarki yang terjadi menyebabkan setiap negara meningkatkan kemampuan militernya untuk dapat mencapai keamanan nasionalnya. Kondisi anarki tersebut disebabkan tidak adanya otoritas yang mengatur dalam hubungan internasional sehingga negara di kawasan Asia Timur satu sama lain meningkatkan kemampuan militernya

meskipun dalam kondisi stabil sekalipun. Meskipun tidak adanya otoritas yang mengatur dalam hubungan internasional tersebut, tetapi tetap peningkatan kemampuan militer dapat menyebabkan negara disekitarnya rentan akan *security dilemma*.

Security dilemma terjadi ketika suatu negara melakukan pengamanan terhadap negaranya yang kemudian disalah artikan oleh negara lain sehingga peningkatan kemampuan militer antarnegara terjadi (Jervis, 1978). Perkembangan kemampuan militer negara dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya *security dilemma*. Hal ini dapat dilihat di kawasan Asia Timur yang memiliki perkembangan kemampuan militer yang memadai. Perkembangan kemampuan militer negara di kawasan Asia Timur menyebabkan negara sekitar merespon akan kemampuan militer yang dilakukan oleh negara lain sehingga rasa khawatir dan sikap saling curiga diantara negara di kawasan Asia Timur muncul sehingga negara di kawasan Asia Timur tidak dapat menutupi dilema keamanan yang terjadi di kawasan tersebut.

Atas *security dilemma* yang terjadi Tiongkok melakukan **strategi pertahanan** atas permasalahan yang terjadi. Menurut Colin S. Gray, bahwa strategi merupakan sebuah penggunaan kekuatan untuk dapat tercapainya tujuan nasional (*ends*) (Gray, 1999). Colin S. Gray mengungkapkan bahwa strategi dibagi menjadi tiga instrumen yaitu *means*, *ways*, dan *ends*. Ketiga instrumen tersebut memiliki keselarasan antara satu dengan yang lainnya. Instrumen *ways* dapat dihubungkan dengan penggunaan kekuatan militer suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut sedangkan *means* bertujuan untuk melakukan kegiatan yang bersifat langsung seperti operasi dan taktik militer yang dilakukan oleh negara dan *ends* yang dapat diartikan sebagai tujuan negara seperti kebijakan untuk dapat mencapai kegiatan *ways* dan *means*. Tentu dengan melakukan strategi pertahanan ini Tiongkok ingin mencapai

keamanan nasional nya yang merupakan bagian penting dalam kepentingan nasional suatu negara (Barry, 1991).

Peningkatan kemampuan militer negara di kawasan Asia Timur dalam mencapai keamanan nasional dapat diterminologikan sebagai kepentingan nasional setiap negara yang harus dicapai. Salah satu instrumen yang dapat melindungi dan mempertahankan keamanan nasional adalah dengan meningkatkan kekuatan militer yang dimiliki suatu negara (Hopkins, 1979). Keamanan nasional tidak terlepas dari adanya penggunaan kekuatan militer sebagai salah satu faktor keberhasilan negara dalam menjaga dan mempertahankan keamanan nasional negaranya. Hal ini dapat dilihat dari negara di kawasan Asia Timur yang tidak terlepas dari pengembangan kemampuan militer sehingga untuk mencapai keamanan nasional tersebut, negara di kawasan Asia Timur melakukan pengembangan kemampuan militer untuk mencapai keamanan nasionalnya. Tiongkok selain memiliki peran atas peningkatan kemampuan militer yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk dapat menghadapi ancaman yang terjadi di kawasan Asia Timur yang dapat menyebabkan ketidakstabilan antarnegara.

B. Pergeseran Keamanan Negara di Kawasan Asia Timur

Keamanan di kawasan Asia Timur dapat dilihat dari tiga kejadian penting di kawasan tersebut diantaranya pasca Perang Dunia II, Perang Dingin, dan Abad ke-21. Pola keamanan di kawasan Asia Timur mulai mengalami pergeseran mulai dari kekalahan besar Jepang pada Perang Dunia II, Perang Korea yang terjadi dan merupakan puncak dari pergeseran keamanan di kawasan Asia Timur dan dampaknya dapat dirasakan sampai saat ini. Kemudian, pada abad ke-21 pola keamanan di kawasan Asia Timur yang tidak adanya ikatan dan sikap saling percaya antarnegara di kawasan tersebut. Hal ini diperkuat dengan kejadian yang terjadi di kawasan

tersebut dan turut dijelaskan didalam *China's National Defense in The New Era*, diantaranya:

“The deployment of the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) system in the Republic of Korea (ROK) by the US has severely undermined the regional strategic balance and the strategic security interests of regional countries. In an attempt to circumvent the post-war mechanism, Japan has adjusted its military and security policies and increased input accordingly, thus becoming more outward-looking in its military endeavors.” (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2019: 5).

Permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Timur telah dijelaskan dalam *China's National Defense in The New Era*, bahwa pengembangan kemampuan militer negara dan perubahan kebijakan Jepang di kawasan Asia Timur dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Selain, menjelaskan aktor internal di kawasan Asia Timur. Tiongkok juga menjelaskan bahwa pengaruh aktor eksternal di dalam kawasan dapat mempengaruhi stabilitas kawasan tersebut. Pengaruh aktor eksternal di kawasan Asia Timur memiliki pengaruh yang sangat besar, jika dilihat pola interaksinya aktor eksternal di kawasan Asia Timur seperti Amerika Serikat memiliki hubungan yang baik dengan Jepang dan Korea Selatan sehingga memungkinkan negara tersebut akan memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya dan hal ini diperkuat dengan adanya bantuan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Kebijakan Pertahanan Jepang pada tahun 2010 dalam *National Defense Program Guidelines for FY2011* memiliki perubahan dan perluasan konsep pertahanan. Sebelumnya, Jepang menegaskan bahwa kebijakan pertahanan yang berawal *“Basic Defense Force Concept”* menjadi *“Dynamic Defense Force”* (The People’s Republic of China, 2010). Jepang semakin aktif dalam melakukan berbagai kegiatan bahkan

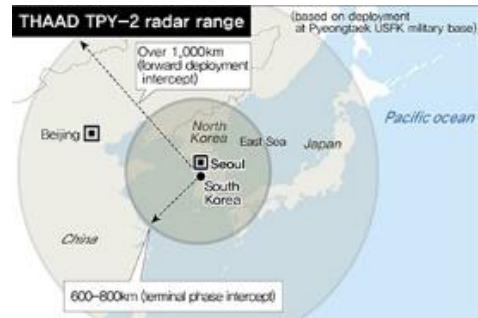
operasi militer bagi pasukan SDF (*Self-Defense Force*) yang merupakan pasukan pertahanan negara Jepang. Jepang meningkatkan kapabilitas pertahanannya dengan melakukan berbagai aktivitas seperti operasi militer maupun latihan militer pada waktu damai sehingga operasi militer tersebut dapat membuat *misperception* negara lain atas reaksi yang terjadi. Berikut ini merupakan hasil perubahan kebijakan pertahanan yang dilakukan oleh Jepang tahun 2012 – 2019.



Gambar 1

Hasil Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2012-2019

Pada tahun 2016, Korea Selatan mengembangkan C4ISR (*Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) (Barnett, 2005) jenis *High Altitude* berupa THAAD melalui *Status of Forces Agreement* (SOFA) dengan bantuan Amerika Serikat. THAAD memiliki jangkauan lebih dari 200 kilometer dan mencapai ketinggian 150 kilometer. Sistem pertahanan THAAD ini dapat mengidentifikasi dan menjangkau ancaman rudal hingga 1.000 kilometer (Army Technology, 2019). Pengembangan THAAD ini sesuai dengan rencana *Defense Reform 2020* sehingga Korea Selatan dapat mencapai kemampuan militer berbasis teknologi yang mutakhir. Kemampuan militer tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu teknologi militer terbaru dalam menjangkau/ mendeteksi ancaman yang ada disekitarnya. Jangkauan radar THAAD Korea Selatan sebagai berikut.



Gambar 2

Jangkauan Radar THAAD Korea Selatan

Jangkauan radar THAAD ini selain dapat melacak keberadaan peralatan pertahanan Tiongkok di bagian timur dan selatan. Tetapi dapat menjangkau seluruh negara di kawasan Asia Timur. Pengembangan THAAD ini merupakan salah satu SOFA Korea Selatan dengan Amerika Serikat sehingga dengan penerapan THAAD ini dapat mengganggu dan menimbulkan ancaman dan *security dilemma* terhadap keamanan dan kepentingan nasional negara lain, terutama Tiongkok sehingga Tiongkok melakukan strategi pertahanan dalam ancaman keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur.

Perkembangan kemampuan militer Korea Utara tidak hanya berupa senjata konvensional seperti senjata nuklir. Korea Utara turut melakukan pengembangan rudal balistik yang memiliki kemampuan jarak pendek-menengah-jauh. Korea Utara melakukan pengembangan rudal balistik karena keputusan Amerika Serikat yang mengembangkan dan menggunakan *Midcourse Defense System* sebagai alat pertahanan yang dapat menghadapi ancaman Korea Utara (Missile Defense Project, 2019). Atas keputusan tersebut, Korea Utara melakukan langkah tegas untuk menghadapi ancaman yang terjadi. Meskipun Korea Utara melakukan pengembangan rudal balistiknya atas dasar kemampuan keamanan Amerika Serikat, tetapi dengan pengembangan rudal balistik tersebut mempengaruhi keamanan di kawasan Asia Timur yang mana negara di dalam kawasan

tersebut menerima dampak atas kemampuan rudal balistik Korea Utara. Kemampuan rudal balistik Korea Utara akan menjadi ancaman keamanan bagi kawasan Asia Timur.

Pada tahun 2019, Korea Utara secara intensif melakukan uji coba rudal jarak pendek. Pada 31 Oktober 2019, Korea Utara menembakkan “*unidentified projectiles*” dari Sunchon di wilayah barat Korea Utara (Masao Dahlgren, 2019). Kemudian, hal ini menimbulkan reaksi dari Jepang dan Korea Selatan. Meskipun rudal tersebut tidak jatuh dan mendarat di kedua negara tersebut. Akan tetapi dengan menembakkan rudal jarak pendek tersebut dapat membuat *security dilemma* dan menambah ketegangan negara sekitarnya. Dengan demikian, kemampuan rudal balistik yang dikembangkan oleh Korea Utara merupakan respon atas pengaruh internal dan eksternal yaitu Amerika Serikat dengan sekutunya. Uji coba rudal jarak pendek yang terjadi di kawasan Asia Timur menimbulkan berbagai persepsi bagi negara lainnya sehingga hal ini menambah ketegangan dan ketidakpercayaan antar negara di kawasan Asia Timur.

C. Pengaruh Kebijakan ‘*Pivot to Asia*’ Amerika Serikat bagi Pertahanan Tiongkok

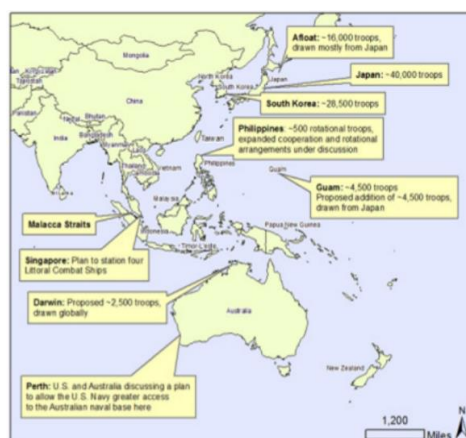
Pada *China’s National Defense in The New Era* telah disebutkan bahwa keberadaan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang memperkuat militer negara aliansinya sekaligus pembangunan kekuatan militer bagi negara aliansi menjadi salah satu langkah yang tegas bagi Amerika Serikat untuk dapat menyebarkan sekaligus mempengaruhi negara aliansinya di kawasan Asia Pasifik. Hal ini diperkuat dalam *China’s National Defense in The New Era* :

“*The US is strengthening its Asia-Pacific military alliances and reinforcing military deployment and intervention, adding complexity to regional security.*” (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2019: 2).

Pada abad ke-21, kawasan Asia-Pasifik menjadi kawasan yang memiliki kepentingan bagi Amerika Serikat. Kawasan Asia-Pasifik yang mencakup kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang memiliki hubungan dan interaksi negara berkembang dan negara maju sehingga kawasan ini memiliki kerentanan akan hubungan dan interaksinya dalam hubungan internasional (Agastya, 2018: 71). Hal ini ditegaskan oleh Barack Obama, bahwa kawasan Asia-Pasifik menjadi kawasan yang penting bagi keamanan dunia sehingga Amerika Serikat memiliki peran dalam kawasan tersebut.

“*I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority.*” (Jennings, 2013).

Kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik merupakan agenda dalam kebijakan pertahanannya. Kawasan Asia-Pasifik selain memiliki lokasi yang strategis dalam melakukan kepentingan nasional suatu negara, kawasan ini merupakan masa depan dari pertahanan dunia. Hal ini menjadikan Kawasan Asia-Pasifik menjadi salah satu prioritas bagi Amerika Serikat mengingat dalam kawasan Asia-Pasifik memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Kawasan Asia-Pasifik memiliki pengaruh kebijakan Amerika Serikat terutama dalam *Pivot to Asia*. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 3
Pengaruh Kebijakan *Pivot to Asia* di Kawasan Asia-Pasifik

Kebijakan *Pivot to Asia* ini memiliki instrumen utama dalam pengaplikasiannya. Pertama, Amerika Serikat melakukan perluasan pasukan termasuk penempatan dan peningkatan kapabilitas pertahanan di kawasan Asia-Pasifik dan melakukan penguatan pertahanan dengan negara sekutunya di kawasan Asia-Pasifik (Brown, 2015). Kebijakan *Pivot to Asia* memiliki pengaruh terhadap keamanan di kawasan Asia-Pasifik sehingga hal ini menyebabkan dan menjadikan Tiongkok mengoptimalkan postur pertahanan negaranya atas pengaruh aktor eksternal di kawasan.

D. Strategi Pertahanan Tiongkok Berdasarkan *China's National Defense in The New Era* Tahun 2019

Tiongkok memperkuat strategi pertahanannya khususnya pada masa pemerintahan Xi Jinping tidak terlepas dari instrumen *ends*/ tujuan nasional dari negara tersebut yang berdasarkan *China's National Defense in The New Era*, karena melihat pengaruh Amerika Serikat didalam kawasan Asia Timur dengan melakukan ekspansi pertahanan dan keamanan terhadap negara aliansinya yakni Jepang dan Korea Selatan dalam kebijakan '*Pivot to Asia*'. Hal ini semakin memperkuat bahwa Amerika Serikat terus berupaya menegaskan kebijakannya atas kawasan Asia Pasifik. Tiongkok mengeluarkan *China's National Defense in The New Era* sebagai salah satu gagasan Tiongkok untuk mempertegas kebijakan pertahanan Tiongkok dan menjelaskan praktik dan tujuan Tiongkok membangun postur pertahanan negara melalui kemampuan militer yang dimilikinya. Transformasi yang terjadi pada masa pemerintahan ini yaitu Tiongkok mencanangkan bahwa sifat kebijakan yang *active-defense*. Tiongkok menegaskan dalam *China's National Defense in the New Era* bahwa:

" *It keeps to the stance that "we will not attack unless we are attacked, but we will surely counterattack if attacked"*. (The State Council

Information Office of the People's Republic of China, 2019: 9).

" *China will never follow the beaten track of big powers in seeking hegemony. No matter how it might develop, China will never threaten any other country or seek any sphere of influence.*" (The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2019: 9).

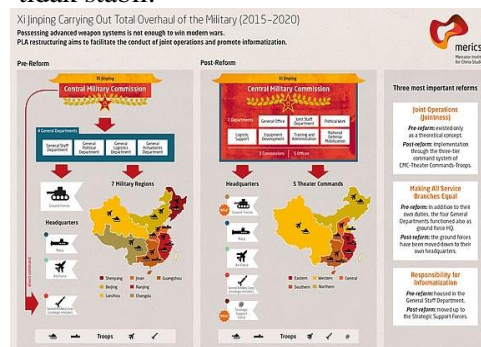
Tiongkok melalui strategi pertahanannya melakukan pembangunan pertahanan negaranya melalui kebaruan militer berbasis teknologi tinggi untuk membangun kualitas postur pertahanan negaranya. Sesuai dengan strategi pertahanan Tiongkok bahwa pasukan PLA (*People Liberation Armys*) *to fully transform the people's armed forces into world-class forces by the mid-21st century*. (The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2019: 11). Tiongkok melakukan pengembangan terhadap pasukan pertahanan untuk memperkuat postur pertahanan dengan memprioritaskan teknologi sebagai salah satu instrumen untuk keamanan dan kepentingan nasionalnya. Tiongkok akan meningkatkan kemampuan teknologi untuk dapat menghadapi keamanan dan ancaman yang terjadi di kawasan Asia Timur. Tiongkok mempertegas bahwa pengembangan pasukan PLA untuk mencapai keamanan negaranya dan sebagai salah satu kontribusi dalam melakukan perdamaian dunia.

Pada tahun 2015, Tiongkok memfokuskan strategi pertahanannya melalui *maritime military struggle* (Campbell et al., 2015). Hal ini sangat penting dilakukan, karena Tiongkok melihat sifat ancaman yang saat ini telah berkembang dan tidak lagi melawati daratan antar negara. Tiongkok melakukan strategi pertahanan tersebut sebagai antisipasi konflik yang terjadi di perairan, khususnya di wilayah perairan Tiongkok. Tiongkok melakukan strategi pertahanannya melalui pasukan PLA Navy sebagai salah satu angkatan senjata yang memiliki peran secara global dalam menghadapi ancaman yang ada. Hal ini

sejalan dengan pasukan PLA dalam melakukan pendidikan dan latihan militer. Pada tahun 2018, Tiongkok melakukan pendidikan dan pelatihan dengan regulasi militer baru yang berbasis *network information system* dalam implementasi pelatihan tersebut. Hal ini bertujuan untuk dapat memperkuat kapabilitas operasional dalam *force-on-force*. Pendidikan dan latihan militer menjadi salah satu penghubung dengan menggunakan kekuatan militer/ *means* dalam pengimplementasiannya untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya. Kemampuan militer negara tidak hanya dilihat melalui teknologi, dan alat persenjataan yang digunakan. Tetapi kapabilitas personil memiliki keterkaitan dengan kemampuan militer negara. Pergeseran keamanan di kawasan Asia Timur menjadikan setiap negara meningkatkan kemampuan kapabilitas personilnya.

Selain melakukan pendidikan dan latihan militer, Tiongkok turut melakukan reformasi militer untuk dapat meningkatkan keamanan nasionalnya. Reformasi militer ini berhubungan dengan postur pertahanan Tiongkok. Pada masa pemerintahan Xi Jinping, pasukan pertahanan Tiongkok secara resmi mengalami reformasi untuk pertama kalinya, Reformasi militer yang dilakukan oleh Xi Jinping dengan mengurangi pasukan pertahanan PLA sebesar 300.000 personil. (The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2019: 18). Pengurangan pasukan tersebut memiliki tujuan tersendiri bagi Tiongkok. Tiongkok memiliki rencana dalam mengurangi jumlah personil pertahanannya, Tiongkok akan melakukan peningkatan terhadap kemampuan teknologi bagi pasukan pertahanan/ PLA. Peningkatan kemampuan bagi pasukan pertahanan/ PLA ini diikuti dengan kemampuan teknologi agar pasukan pertahanan/ PLA selain memiliki keterampilan yang memadai disertai dengan kemampuan teknologi yang baik agar dapat

menghadapi situasi dan kondisi yang tidak stabil.



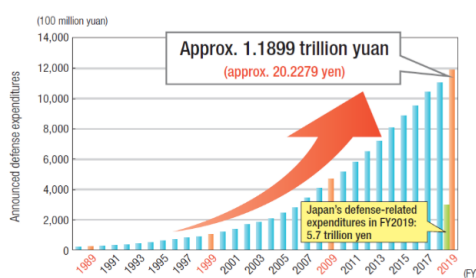
Gambar 4
Reformasi Militer Tiongkok Tahun 2015 - 2020

Pada masa pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok mengalami reformasi militer yang sangat signifikan berubah, mulai dari perubahan struktur dan postur pertahanan Tiongkok, serta penempatan pasukan pertahanan/ PLA yang didukung oleh kemampuan pertahanan berbasis alat dan teknologi yang digunakan. Xi Jinping melakukan perubahan tersebut dengan melihat perubahan keamanan dan ancaman yang didapatkan oleh Tiongkok saat ini sudah bukan lagi ancaman yang bersifat konvensional. Tetapi sudah kepada ancaman militer bersifat non konvensional seperti penggunaan senjata nuklir, kimia, biologis lainnya dan misil balistik.

Tiongkok dalam mendukung reformasi militer yang dilakukan turut melakukan *joint operation systems* untuk meningkatkan kapabilitas pasukan militernya. Tiongkok membagi wilayahnya atas ancaman yang dihadapi dengan membentuk *Eastern Theater*, *Southern Theater*, *Western Theater*, *Northern Theater*, dan *Central Theater*. Masing-masing wilayah tersebut ditempati oleh PLAA, PKARF, *People Liberation Army Strategic Support Force* (PLASSF), dan *Joint Logistics Support Force* (Japan Ministry of Defense, 2019). Penempatan pasukan pertahanan tersebut merupakan salah satu strategi pertahanan Tiongkok dalam menghadapi ancaman baik secara internal dan eksternal negaranya. Pembagian wilayah

tersebut menjadi strategi pertahanan Tiongkok agar dapat memantau perkembangan dan ancaman yang terjadi di wilayah tersebut atas pergeseran keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur.

Pengoptimalisasian dalam kemampuan militer negara tidak akan terlepas dari anggaran pertahanan negara tersebut. Anggaran pertahanan negara menjadi salah satu hal terpenting dalam mencapai keamanan dan kepentingan nasional dan hal ini dapat diterminologikan dalam instrumen *ways* sebagai cara untuk dapat mencapai tujuan nasional. Anggaran pertahanan memiliki pengaruh terhadap kapasitas dan kapabilitas militer suatu negara. Anggaran pertahanan di Asia dan Oceania mencapai 507 triliun dollar pada tahun 2018 dengan persentase 28 persen dari hasil pengeluaran militer global *Force* (Japan Ministry of Defense, 2019). Pengeluaran anggaran pertahanan di Asia dan Oceania ini di dominasi oleh lima negara yang menduduki hasil pengeluaran anggaran pertahanan diantaranya: Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok secara signifikan dilakukan pada tahun 2009 hingga saat ini. Berikut ini merupakan peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok.



Gambar 5
Peningkatan Anggaran Pertahanan Tiongkok Tahun 1989-2019

Pada tahun 2009 dan 2018, Tiongkok melakukan pengeluaran anggaran pertahanan sebesar 49 persen dari total pengeluaran anggaran pertahanan kawasan ini *Force* (Japan

Ministry of Defense, 2019). Berdasarkan *China's National Defense* meningkatkan anggaran pertahanan menjadi agenda penting. Selain untuk meningkatkan kemampuan militer PLA juga dapat menciptakan teknologi militer berkemampuan tinggi. Peningkatan anggaran tersebut menjadi salah satu fungsi dalam mengoptimalkan postur pertahanan Tiongkok. Peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok sesuai dengan *China's National Defense in The New Era* pada tahun 2019, untuk mentransformasikan pasukan PLA untuk dapat mencapai pasukan pertahanan kelas dunia pada abad ke-21. Peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok yang sangat tinggi merupakan salah satu strategi dalam mentransformasikan pasukan pertahanannya dengan kapasitas dan kapabilitas baik pasukan PLAN, PLAAF, PLAA, PLARF. Hal ini berhubungan dengan reformasi militer dan pengembangan sains dan teknologi militer yang dilakukan oleh Tiongkok.

Kesimpulan

Tiongkok dalam mengoptimalkan postur pertahanan negaranya berdasarkan *China's National Defense in The New Era* dengan melakukan strategi pertahanan sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh Colin S. Gray yang meliputi instrumen *ends, means, dan ways*. Tiongkok melakukan pertahanan yang bersifat *active-defense* sebagai salah satu strategi untuk dapat mengoptimalkan postur pertahanan negaranya. Dengan melihat berbagai ancaman yang dapat mengancam stabilitas di kawasan Asia Timur baik dari aktor internal hingga aktor eksternal. Tiongkok melakukan berbagai strategi untuk dapat mencapai keamanan nasionalnya seperti melakukan *maritime military struggle*, pendidikan dan pelatihan dengan regulasi militer baru yang berbasis *network information system*, sekaligus memperkuat kapabilitas operasional dalam *force-on-force* hingga melakukan peningkatan anggaran pertahanan. Hal ini dilakukan atas *distrust* yang terjadi di kawasan Asia Timur sekaligus menjadi momentum untuk melakukan reformasi militer yang terjadi pada tahun

2015 hingga 2020 sesuai dengan *China's National Defense in The New Era*. Dengan demikian, Tiongkok melakukan strategi pertahanan tersebut untuk dapat mengoptimalkan postur pertahanan negaranya secara khusus dalam mengatasi pergeseran keamanan di kawasan Asia Timur.

Bibliografi

- Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan HAM RI.
- Army Technology. (2019). "THAAD Terminal High-Altitude Area Defence, United States of America," *Army-Technology*, internet (22 November). <http://www.army-technology.com/projects/thaad/>
- Barnett, T. P. M. (2005). *The Pentagon's new map: War and peace in the twenty-first century*. Penguin.
- Barry, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era*. Dorchester: Pearson-Longman.
- Brown, S. (2015). *Faces of power: constancy and change in United States foreign policy from Truman to Obama*. Columbia University Press.
- Campbell, C., Economic, U.-C., & Commission, S. R. (2015). Highlights from China's New Defense White Paper, 'China's Military Strategy.' *US-China Economic and Security Review Commission, Issue Brief, 1*.
- CNN Indonesia. (2018). "Bantu AS Lawan China-Rusia, Jepang Tambah Jet dan Rudal," *CNN Indonesia* (18 Desember) internet, 10 Oktober 2019,. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218123522-113-354520/bantu-as-lawan-china-rusia-jepang-tambah-jet-dan-rudal>
- CNN Indonesia. (2019). "AS Latihan Angkatan Laut bersama Jepang, Korea Selatan, dan Australia," *CNN Indonesia* (23 Mei) internet, 30 September 2019,. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190523192934-113-397911/as-latihan-angkatan-laut-bersama-jepang-korsel-australia>
- Ericssen. (2017). "Sejarah Pengembangan dan Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara," *Kompas Internasional* (04 September) internet, 15 Oktober 2019,.
- Gray, C. S. (1999). *Modern strategy* (Vol. 42). Oxford University Press Oxford.
- Hopkins, R. F. dan R. W. (1979). *Mansbach, Structure and Process in International Politics*, (New York: Harper and Row Publisher).
- Japan Ministry of Defense. (2019). "Defense of Japan 2019." *Ministry of Defense* (2019), internet (20 November 2019), 15-16.
- Jennings, P. (2013). The US Rebalance to the Asia-Pacific: An Australian Perspective. *Asia Policy*, 15, 38–44.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics: A Quarterly Journal of International Relations*, 167–214.
- Jill Steans and Lloyd Pettiford. (2009). *International Relations: Perspectives and Themes*, (England: Pearson Educations Limited).
- Masao Dahlgren. (2019). "North Korea Launches Short-range Missiles." *Missile Threat, Center for Strategic and International Studies*, (31 Oktober 2019), internet (23 November 2019),.
- Missile Defense Project. (2019). "Missiles of North Korea." *Missile Threat, Center for Strategic and International Studies*, (06 November 2019), internet (23 November 2019),.

Pascal. (2017). “Korut Kembali Bersiap untuk Uji Coba Rudal Balistik Antarbenua,” *Kompas Internasional* (04 September 2017) internet, 15 Oktober 2019,.
<https://internasional.kompas.com/read/2017/09/04/19200821/korut-kembali-bersiap-untuk-uji-coba-rudal-balistik-antarbenua>

Sankaran, J. (n.d.). Missile Defenses And Strategic Stability In Asia: Evidence From Simulations. *Journal of East Asian Studies*, 1–24.

Sebastien Roblin. (2019). “Meet South Korea’s Very Own Killer S-300 Air Defense System,” *The National Interest* (24 Februari 2019) internet, 10 Oktober 2019,.
<https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-south-koreas-very-own-killer-s-300-air-defense-system-45477>

Teuku May Rudi. (1997). *Studi Kawasan Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, (Bandung: Bina Budhaya).

The People’s Republic of China. (2010). “National Defense Program Guidelines for FY 2011 and beyond.” *The Security Council and the Cabinet* (17 Desember 2010) internet, 10 November 2019,.
https://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/guidelinesFY2011.pdf

Wu, C. C.-H. (2019). Why Do States Hedge in East Asia? An Empirical Study on Hedging. *Asian Perspective*, 43(3), 557–584.

Copyright holder :
Fardhal Virgiawan Ramadhan (2021).

First publication right :
Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

